



Prospek Reformasi Hukum Bisnis Indonesia Pasca Penghentian Indeks *Ease of Doing Business*

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.
Direktur Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas

Selasa, 2 November 2021



AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

Visi – Misi Presiden

- 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Penegakan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Presiden

- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhanaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

7 Agenda Pembangunan



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM RPJMN 2020 – 2024

PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Penyusunan RKP Tahun 2022 memperhatikan RPJMN 2020-2024

PP 1

Konsolidasi Demokrasi

PP 2

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

PP 3

Penegakan Hukum Nasional

PP 4

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

PP 5

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional



Penataan Regulasi

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi
2. Pembaruan Substansi Hukum

1



Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha
2. Penerapan Keadilan Restoratif
3. Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan
4. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim

2



Penguatan Sistem Anti Korupsi

1. Penguatan implementasi Stranas Pencegahan Korupsi
2. Optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset

3



Penguatan Akses terhadap Keadilan

1. Penguatan layanan keadilan
2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat

4



RPJMN 2020-2024 : INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM

| Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas | Indikator | Target | |
|---|--|--------|--------|
| | | 2020 | 2024 |
| 3 Penegakan Hukum Nasional | Indeks Pembangunan Hukum | 0.65 | 0.73 |
| 3.1 Penataan Regulasi | Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK | 12,15% | 8,15% |
| | Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA | 11,05% | 7,05% |
| 3.2 Perbaiki Sistem Hukum Pidana dan Perdata | Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak | 120 | 70 |
| | Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan | 30 | 20 |
| | Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit | 30 | 20 |
| | Persentase Pelaku Residivis | 11% | 9% |
| 3.3 Penguatan Sistem Anti Korupsi | Indeks Perilaku Anti Korupsi | 4,00 | 4,14 |
| 3.4 Peningkatan Akses terhadap Keadilan | Indeks Akses terhadap Keadilan | 65-70% | 71-80% |



Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Kemudahan Berusaha

Penyempurnaan Hukum Ekonomi bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yakni **Peringkat EODB 10** dan peranan **investasi terhadap PDB sebesar 38,1%**

Target Peringkat EoDB Indonesia sesuai dengan RPJMN 2020-2024 :

Indikator Indeks EoDB



World Bank Group resmi **mengakhiri indeks EoDB** pada September 2021, karena **ketidaksesusain data pada laporan dan integritas data** beberapa negara seperti China, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Azerbaijan. Saat ini sedang dilakukan pembahasan untuk mencari pengganti indeks EoDB.



Enforcing Contract

Baseline 2019: 146
Target 2024: 70

Getting Credits

Baseline 2019: 44
Target 2024: 20

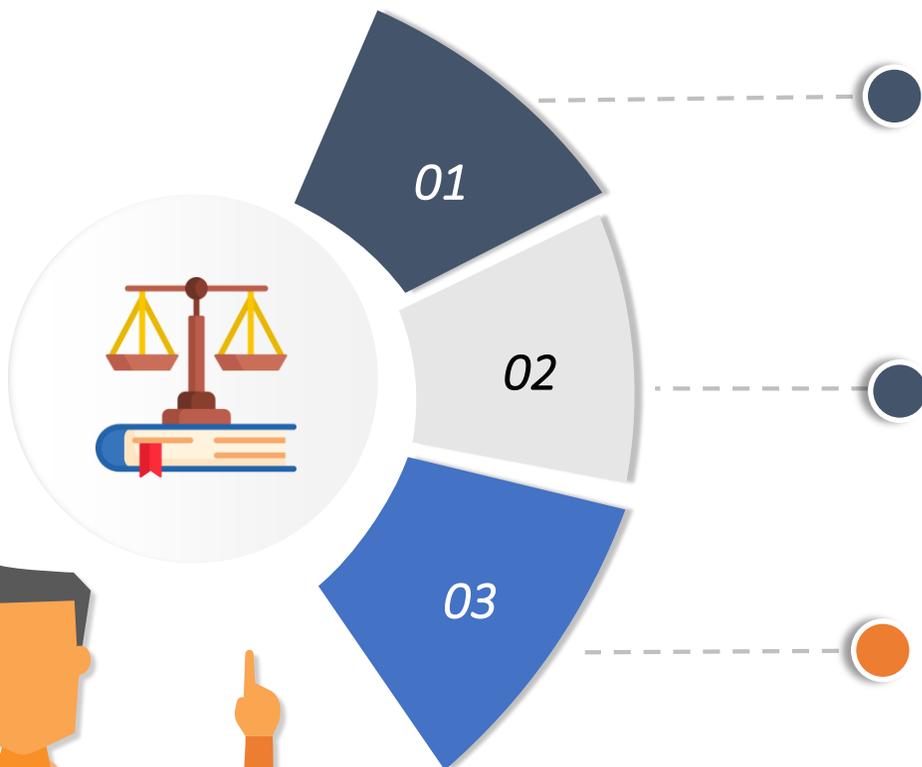
Resolving Insolvency

Baseline 2019: 36
Target 2024: 20

Sumber :
1. Narasi RPJMN 2020-2024
2. <https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness>



Pembangunan Bidang Hukum dalam Mendukung Kemudahan Berusaha



Getting Credit

- Indikator *Getting Credit* sebagai meninjau hukum jaminan asset dan sistem informasi kredit. **Skor Getting Credit masih pada posisi 44 dari 190.**
- Pemerintah telah mendorong percepatan **NA dan RUU Jaminan Benda Bergerak** serta melalui revisi **Permenkumham Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.**

Resolving Insolvency

- Meninjau waktu, biaya dan tingkat kepatuhan pemulihan kebangkrutan komersial. **Skor Resolving Insolvency berada di posisi 38 dari 190 negara**
- Dukungan pemerintah saat ini telah dilakukan dengan penyusunan **RUU Kepailitan**

Enforcing Contract

- Indikator *Enforcing Contract* meninjau waktu, biaya dan proses penyelesaian sengketa komersial. **Skor Enforcing Contract berada pada urutan 139 dari 190 negara** diakibatkan waktu, biaya dan kualitas peradilan yang masih cenderung lemah.
- Dukungan pemerintah saat ini dilakukan dengan pelaksanaan **penguatan kualitas dan Kuantitas SDM Jurusita di Mahkamah Agung**



Sinergitas Penyusunan Kebijakan dan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dasar hukum penyusunan Kerangka Regulasi dan Prolegnas

1. PP No.17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
2. UU No.15/2019 ttg Perubahan Atas UU No.12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

A. Bidang Pariwisata

1. RPerpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado – Likupang
2. RPerpres Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung

B. Bidang Ekonomi

1. RPerpres tentang Redesain Transformasi Ekonomi Indonesia Pascapandemi Covid-19



PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

A. Mendukung MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

1. Rperpres tentang Perlindungan Sosial Adaptif
2. Rperpres tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
3. Rperpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota

B. Mendukung MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

1. Rperpres tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan
2. Rperpres tentang Dokter Layanan Primer
3. Rperpres tentang Jaminan Kesehatan



PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

1. **RUU KUHAPerdata**, bertujuan untuk menyelesaikan masalah pengaturan hukum acara perdata yang **substansinya sudah tidak relevan** dengan perkembangan zaman serta mendukung penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien
2. **RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, untuk menjamin **kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan**, mendorong kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi
 - Kebutuhan regulasi lainnya di bidang hukum ekonomi
 1. **RUU Badan Usaha**. Namun belum masuk dalam Kerangka Regulasi RKP 2022. RUU ini akan menggantikan regulasi eksisting (UU PT, KUHAPerdata (Firma dan CV) dan Kitab UU Hukum Dagang) dimana terdapat **pasal-pasal yang disharmoni** satu dengan lainnya dan dilakukan penyesuaian setelah diundangkannya **UU Cipta Kerja**.
 2. **RUU Jaminan Benda Bergerak** akan menggantikan regulasi eksisting yakni UU Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia dimana terdapat **pasal-pasal yang disharmoni** satu dengan lainnya serta pengaturan mengenai jaminan **objek kebendaan lainnya** seperti Resi Gudang dan Hipotek.



Rencana Tindak Lanjut



01

Melakukan pemutakhiran RKP 2022 terhadap Indikator Prioritas Nasional dan Output Prioritas Nasional terkait dengan kemudahan berusaha sesuai dengan *timeline* pemutakhiran RKP (November 2021)

02

Mempertimbangkan alternatif instrumen pengukuran kemudahan berusaha :

1. Membuat survei sendiri dengan *baseline* 10 indikator eksisting
2. WBG membuat survei baru dengan indicator eksisting namun menggunakan metodologi yang berbeda

03

Menunggu dan mendukung kajian yang dilakukan oleh BKPM dibantu Delloitte terkait dengan roadmap dan pengganti dari survey EoDB

TERIMA KASIH

